

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

- Daim, Nuryanto A., 2014, *Hukum Admnistrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya.
- Danil, Elwi, 2011, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., *et all.*, 2011, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi*, Gadjah Mada Univesity Press, Yogyakarta
- Istanto, F. Sugeng, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta
- Jeddawi, Murtir, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Total Media, Yogyakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009, *Konflik Kepentingan, Panduan Penanganan Konflik Kepentingan bagi Penyelenggara Negara, Komisi Pemerantasan Korupsi*, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, *5 Prespektif Antikorupsi KPK bagi Kepala Daerah*, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Kedeputian Pencegahan KPK, Jakarta.
- Latif, Abdul, 2014, *Hukum Administrasi dalam Praktik Tindak Pidana Korupsi*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Marbun, S.F., 2013, *Hukum Administrasi II*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Pohan, Agustinus, *et all.*, 2008, *Pengembalian Aset Kejahatan*, PuKAT Korupsi FH UGM, Yogyakarta, Jakarta.
- Prakoso, Djoko, 1986, *Peranan Pengawasan dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Ridwan, 2009, *Hukum Administrasi di Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sardjono, Agus, *et all.*, 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Supeno, Hadi, 2009, *Korupsi di Daerah Kesaksian, Pengalaman, dan Pengakuan*, Total Media, Yogyakarta.

b. Jurnal, Makalah, Laporan Penelitian

Arum, Materna Ayu Nurvita Sekar, 2012, *Tinjauan Yuridis Tentang Penyidikan Pejabat Pemerintah Daerah di Kabupaten Sleman yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi oleh POLDA DIY*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Faizin, Riza Mirza, 2014, *Pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam Penyalahgunaan Wewenang Pengadaan Barang dan Jasa*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Latifah, Marfuatul, 2015, "Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*: Vol 6, No. 1, Juni 2015.

Nilawati, Sri, *et. all*, 2012, *Digerus Politisasi Anggaran Pemilukada DKI Jakarta 2012*, Indonesia Budget Center, Jakarta.

Nur, Andi Dzul Ikhrum, 2015, *Tinjauan Hukum Administrasi terhadap Penyalahgunaan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

Perludem, 2015, *Dana Kampanye Pilkada: Pengaturan Teknis tentang Sumbangan, Pengeluaran, dan Pelaporan Berdasarkan UU No 1/2015 juncto UU No8/2015*, Yayasan Perludem, Jakarta.

Wafa, Khoirul Ari, 2013, *Pengembalian Aset (Asset Recovery) hasil tindak pidana korupsi (Studi Komparasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

c. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77).

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47) .

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5).

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57)

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130).

TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

TAP MPR Nomor VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Asset.

d. Website

- Abba Gabrillin, 2016, "ICW : Banyak Kepala Daerah Terima Keuntungan dari Proyek Swasta", <http://nasional.kompas.com/read/2016/08/28/18534521/icw.banyak.kepala.daerah.terima.keuntungan.dari.proyek.swasta>, diakses pada 28 Agustus 2016.
- ASP, 2015, "Jalan Memutar Menjerat Koruptor: PTUN Dulu, Pidana Belakangan", <http://news.detik.com/berita/2873113/jalan-memutar-menjerat-koruptor-ptun-dulu-pidana-belakangan>, diakses pada 17 Desember 2016.
- Daniel H.T., 2016, "Mengapa Hukuman Ringan Koruptor Selalu di Bawah 5 Tahun Penjara?", http://www.kompasiana.com/danielht/mengapa-hukuman-ringan-koruptor-selalu-di-bawah-5-tahun-penjara_56c6b0cbd57e610313b919f5, diakses pada 3 September 2016.
- Elza Astari Retaduari, 2016, "PPATK Laporkan 20 Rekening Dalam nominal yang tidak wajar Kepala Daerah ke Kejagung dan KPK", <http://news.detik.com/berita/3298110/ppatk-laporkan-20-rekening-dalam-nominal-yang-tidak-wajar-kepala-daerah-ke-kejagung-dan-kpk>, diakses pada 11 November 2016.
- Gilang Fauzi, 2014, "Ada 26 Bupati Miliki Rekening Berisi Lebih dari Rp 1 Triliun", <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141230192941-12-21456/ada-26-bupati-miliki-rekening-berisi-lebih-dari-rp-1-triliun/>, diakses pada 11 November 2016.
- Ikhwanul Khabibi, 2015, "Selama 11 Tahun, Ada 56 Kepala Daerah yang Terjerat Kasus Korupsi di KPK", <http://news.detik.com/berita/2984630/selama-11-tahun-ada-56-kepala-daerah-yang-terjerat-kasus-korupsi-di-kpk>, diakses 10 November 2016.
- Imam Santoso, 2013, "Mahfud tegaskan UU Pembuktian Terbalik hapuskan korupsi", <http://www.antarane.ws.com/berita/400913/mahfud-tegaskan-uu-pembuktian-terbalik-hapuskan-korupsi>, diakses pada 15 September 2016.
- Indra Akuntono, 2013, "Ini Daftar Kepala Daerah Berpenghasilan Tertinggi Versi FITRA", <http://nasional.kompas.com/read/2013/12/02/0344437/Ini.Daftar.Kepala.Daerah.Berpenghasilan.Tertinggi.Versi.Fitra>, diakses pada 3 Januari 2016.

- Kristian Erdianto, 2016, “Aset Koruptor Seharusnya Juga Disita untuk Negara”,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/02/22/09171091/Aset.Koruptor.Seharusnya.Juga.Disita.untuk.Negara>, diakses pada 3 September 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, “Aset Koruptor, Mengapa Harus Disita?”, <http://acch.kpk.go.id/buku-spak/-/blogs/aset-koruptor-mengapa-harus-disita->, diakses pada 21 Oktober 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, “ Mengenai LHKPN”,
<http://www.kpk.go.id/id/layanan-publik/lhkpn/mengenai-lhkpn>, diakses pada 12 September 2016.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2015, “LHKPN:Transparansi Pemimpin Negeri”, <http://acch.kpk.go.id/tema/-/blogs/lhkpn-transparansi-pemimpin-negeri>, diakses pada 1 November 2016.
- Trisuharto Clinton, 2016, “Korupsi: Pemidanaan Badan atau Pengembalian Keuangan Negara”,
<http://www.hukumpedia.com/risuhartolinton/korupsi-pemidanaan-badan-atau-pengembalian-keuangan-negara>, diakses pada 3 Januari 2016.